



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2023**

**KOMISI II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**2023**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2023**

---

**Pengantar Ketua Tim Kunjungan Reses**

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan kegiatan kunjungan kerja Komisi II DPR RI masa reses persidangan III tahun sidang 2022-2023, yang pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada DPR RI, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi II DPR RI ingin mengetahui beberapa hal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur.

Terkait persiapan pemilu 2024 Komisi II DPR RI ingin mengetahui perkembangan verifikasi faktual data pemilih yang kini tengah dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, termasuk di Kalimantan Timur. Untuk hal ini, waktu menjelang pemilu tinggal 12 bulan lagi, jadi kami ingin melihat sudah sejauh mana verifikasi faktual data pemilih di Kalimantan Timur, pentahapan yang telah dan akan dilakukan persiapannya, termasuk penyelenggara pemilu ad hoc menggunakan aplikasi SIAKBA, dan juga dapil dan kursi untuk DPRD Kab/kota.

Terkait IKN, Komisi II DPR RI juga akan mendalami beberapa permasalahan pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak lepas dari masalah. Negara pun diminta tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tetap mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut. Sehingga, proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik agraria berkepanjangan.

Dalam Kunjungan Reses di Kalimantan Timur dihadiri :

<b>NO</b>	<b>NO - A</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	A-015	H. Yanuar Prihadin, M.Si	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi II/F-PKB
2.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDIP
3.	A-248	Hj. Aida Muslimah, S.E.	Anggota/ F-PDIP
4.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/F-P Gerindra

5.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-P Nasdem
6.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.	Anggota/ F-P Demokrat
7.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M.	Anggota/ F-P Demokrat
8.	A-528	Rekza Oktoberia	Anggota/ F-P Demokrat
9.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
10.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F-PKS
11.	A-490	Khairul Muhtar, S.E., M.M.	Anggota/ F-PAN

## **II. Hasil Kunjungan**

### **Sambutan pejabat Provinsi Kalimantan Timur**

Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam Christianus Benny menyampaikan salam dari Gubernur Kalimantan Timur yang berhalangan hadir. Dan menyampaikan terima kasih serta permohonan maaf atas ketidakhadirannya. Selanjutnya Christianus Benny menjelaskan, kondisi Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Indeks demokrasi di Kaltim tahun 2022 berada di urutan ketiga teratas yaitu 81,99 setelah DKI Jakarta dan Gorontalo. Menandakan kondisi politik dan kesadaran politik masyarakat di Kaltim lebih baik. Terkait persiapan pemilu 2024 Pemerintah Provinsi Kaltim juga mendukung dan ikut menyukseskan pemilu serentak 2024.

### **A. Paparan-Paparan**

#### **1. KPU Kalimantan Timur**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# KUNJUNGAN KERJA

## RESES KOMISI II DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

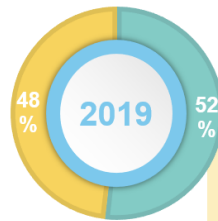
SAMARINDA, 17 JANUARI 2023

## DAFTAR PEMILIH TETAP

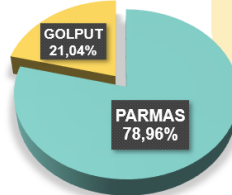
PEMILU 2014 DAN 2019  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**DPT 2.846.861 Pemilih**  
14 Kabupaten/Kota



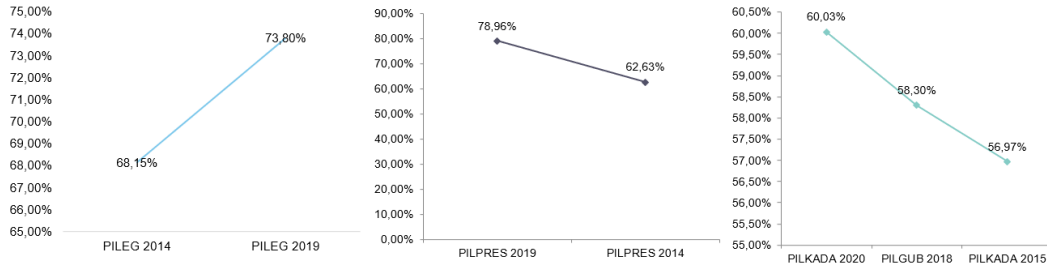
**DPT 2.481.386 Pemilih**  
10 Kabupaten/Kota  
Laki – Laki : 1.285.439  
Perempuan : 1.195.947



**Partisipasi Masyarakat**  
**TOTAL (DPT+DPTb) 2.662.476**  
Hadir: 2.003.281  
Tidak Hadir : 659.195

# PARTISIPASI MASYARAKAT

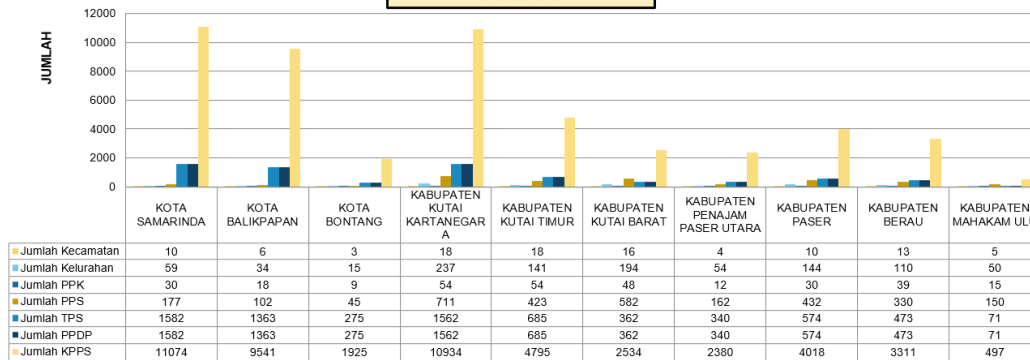
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 2014 - 2019 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# PETUGAS AD-HOC

PPK, PPS, PANTARLIH DAN KPPS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

**TOTAL PETUGAS AD-HOC  
51.009**



## Pagu dan Realisasi Anggaran

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
2017	Rp 66.840.531.000	Rp 29.783.537.407	Persiapan Pilgub 2018
2018	Rp 307.150.350.000	Rp 243.198.896.567	Pilgub 2018
2019	Rp 30.523.804.000	Rp 27.407.738.163	Pemilu dan Pemilihan 2019
2020	Rp 7.716.422.000	Rp 7.470.039.843	Pilkada 2020
2021	Rp 6.773.142.000	Rp 6.683.705.658	
2022	Rp 18.087.953.000	Rp 16.896.070.275	

## 2. Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur



**Kanwil BPN  
Provinsi Kalimantan Timur**

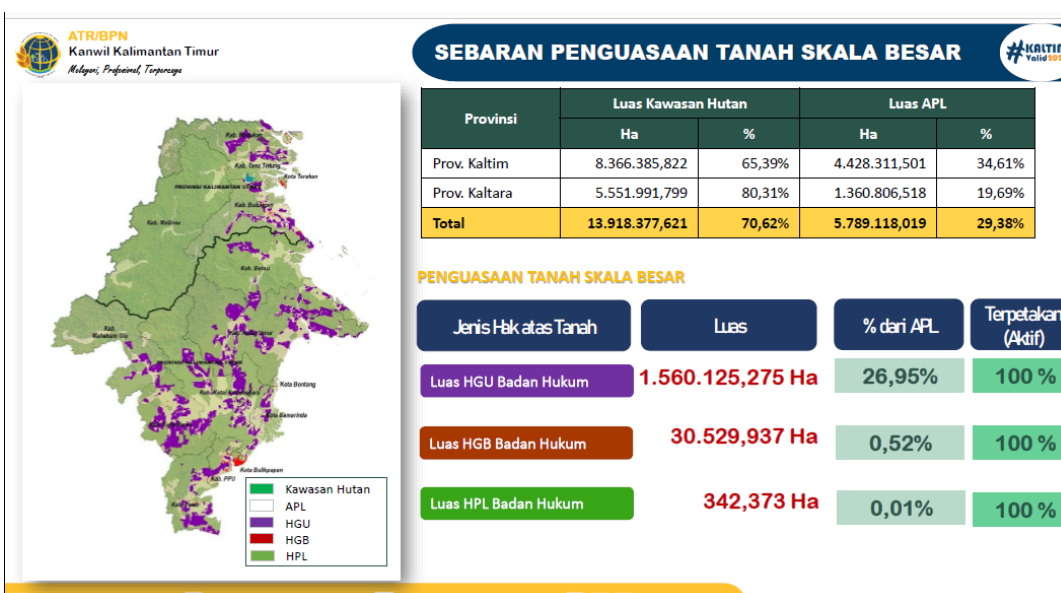
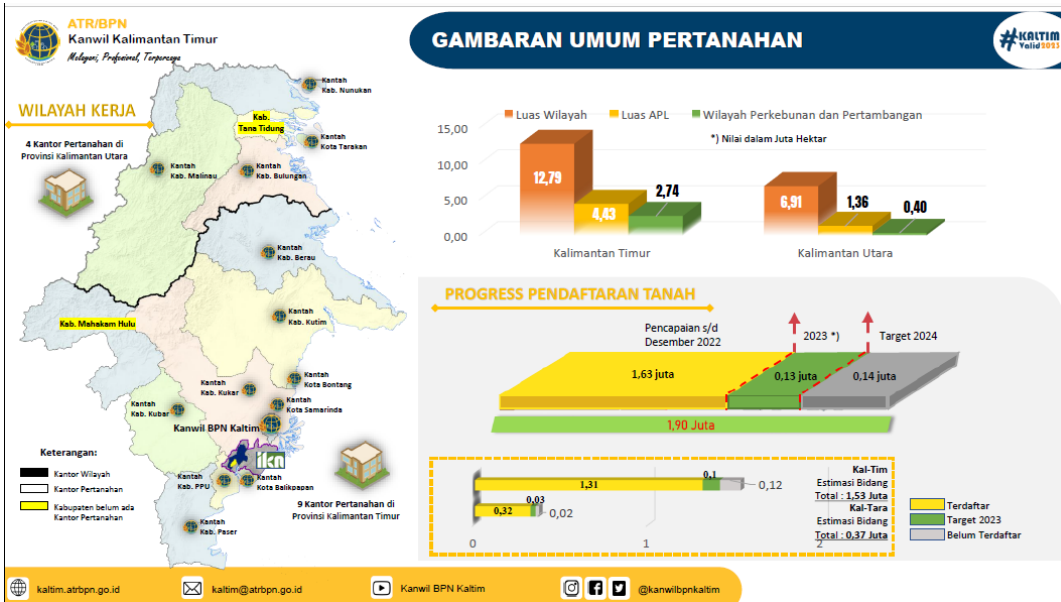
**Penyampaian  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Kalimantan Timur**

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI  
Ke Provinsi Kalimantan Timur  
Masa Persidangan Tahun Sidang III 2022-2023



Balikpapan, 17 Februari 2023

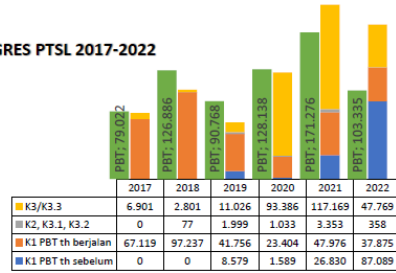
[kaltim.atrbpn.go.id](http://kaltim.atrbpn.go.id) [kaltim@atrbpn.go.id](mailto:kaltim@atrbpn.go.id) [Kanwil BPN Kaltim](https://www.youtube.com/KanwilBPNKaltim) [@kanwilbpnkaltim](https://www.instagram.com/kanwilbpnkaltim)



PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP



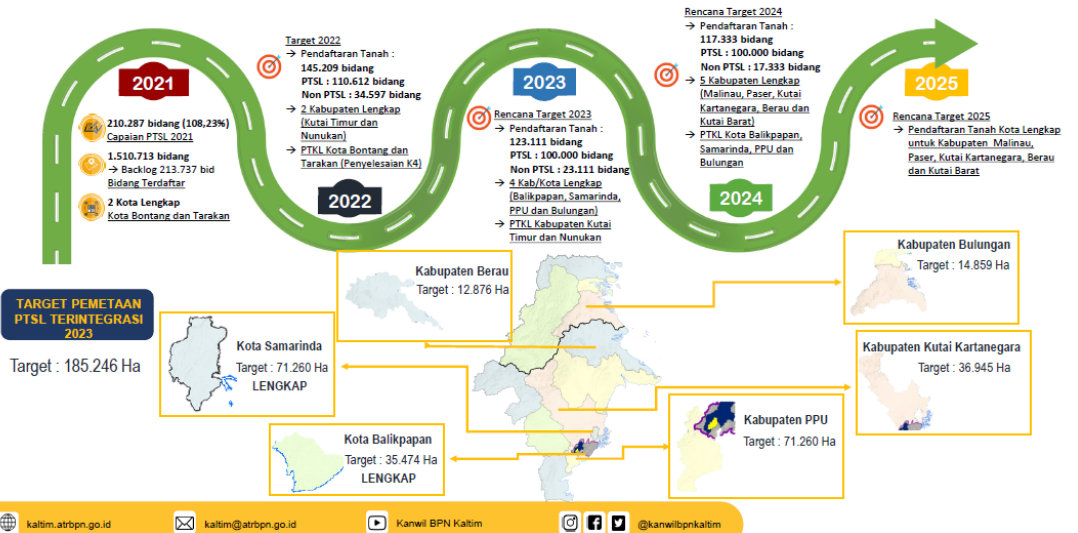
PROGRES PTSL 2017-2022



HAMBATAN DAN KENDALA PTSL

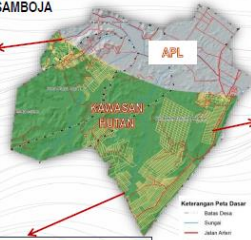
Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah merupakan aspek penting dalam suksesnya kegiatan PTSL, akan tetapi dalam pelaksanaannya partisipasi masih rendah, diantaranya disebabkan beberapa hal :

1. Beban Pajak (Beban Perolehan Hak atas Tanah) yang membebani masyarakat, solusinya diperlukan dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan/ pembebasan BPHTB
2. Data pendukung kegiatan yang belum tersedia maksimal, seperti : Data Batas Administrasi, Data Kependudukan (Data NIK KTP Elektronik), dll, solusinya perlu dukungan dari kementerian/ pemerintah daerah dalam percepatan penyiapan data
3. Dukungan penganggaran Pra PTSL untuk memacu perangkat Desa/ Kelurahan dalam membantu kelancaran kegiatan PTSL
4. Dukungan kegiatan pasca PTSL berupa penyusunan program untuk memberikan bantuan akses reform pada lokasi-lokasi PTSL





OBJEK TORA  
DI KECAMATAN SAMBOJA



Keterangan Peta Dasar  
 - Batas Desa  
 - Sungai  
 - Jalan Desa  
 - Jalan Kota  
 - Jalan Lintas  
 Keterangan Peta  
 - Sertipikat Tanah  
 - Tanah Hutan/Hutan

- TINDAKLANJUT GTRA PROV. KALTIM
1. Surat No. 01 /KPH.GTRA-Provinsi/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Usulan Pelepasan Kawasan TAHURA Bukit Soeharto untuk Masyarakat Desa Karya Jaya, Wonotirto dan Tanjung Harapan
  2. Surat No. NP.02.02/1432-64/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Penyampaian Upaya Lebih Lanjut Tentang Laporan Kepala Desa Karya Jaya kepada Presiden RI
  3. Surat No. 01/KPH.GTRA-Provinsi/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Usulan Pelepasan Hak Pengelolaan dan IUPHHK sekarang Perzinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBBH)

OBJEK TORA; AREAL PENGGUNAAN LAIN DIBEBANI IZIN KEHUTANAN



Salah satu contoh Desa yang berada di APL tetapi masih terdapat izin kehutanan (IUPHHK sekarang PBBH) PT. Inuhani II. Sehingga tidak bisa dilaksanakan Redistribusi Tanah

\* Jumlah sertipikat dalam Kawasan Hutan

**POTENSI DESA KARYA JAYA**  
 Hasil produksi tani 13.200 ton/tahun TERBESAR di Kab. Kutai Kartanegara  
 Peternakan sapi dengan jumlah sapi **terbanyak KELIMA** di Kab. Kutai Kartanegara

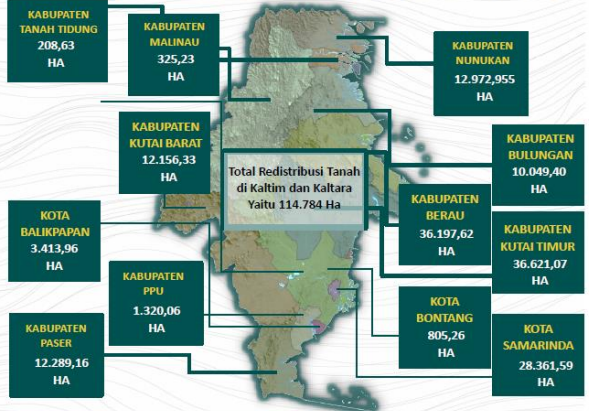
REALISASI TAHUN 2022

	Target	Realisasi
Fisik (bidang)	8.429	5.812
Keuangan (Rp)	1.566.407.000	1.415.130.309

HAMBATAN DAN KENDALA  
Pelaksanaan Tahun 2022

Sesuai surat Klarifikasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda, No. 624/BPKH.IV/ISDHL/PLA.0/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Hal: Tanggapan Permohonan Klarifikasi Potensi Objek Redistribusi Tanah tahun 2022 terhadap Perzinan Bidang kehutanan disampaikan bahwa dari 10.874,22 Ha seluas 10.805,72 Ha berada di APL tetapi bukan merupakan potensi redis dan tidak dapat ditindaklanjuti untuk sertifikasi dikarenakan masih terdapat izin PBBH, sedangkan sisanya masuk Kawasan hutan.

JUMLAH BIDANG TANAH TER-REDISTRIBUSI DARI TAHUN 1983 – 2022\*



\* masih proses updating data lama

**ATR/BPN**  
Kanwil Kalimantan Timur  
*Melayu, Profesional, Terpadu*

**TATA RUANG WILAYAH**

**KALTIM**  
Valid 1993

**Pembentukan Sekretariat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penataan Ruang di Kanwil BPN Kalimantan Timur**

- PPNS Penataan Ruang bertugas untuk melakukan penegakan hukum, termasuk penyidikan terhadap pelanggaran penataan ruang.
- Sekretariat PPNS Penataan Ruang akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana, yakni Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi dan membawahi dua unit kerja yakni unit pengelolaan kasus serta unit administrasi.

**Contoh Sengketa/Pelanggaran Penataan Ruang**

**Indikasi Pelanggaran**  
Perumahan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau

**Lokasi**

**Rekomendasi**

- Pengenaan Sanksi administratif berupa denda yang telah disetujui oleh pihak pelanggar dan Pemerintah Daerah yang diatur setelah ditetapkan Perwali.
- Pemerintah Daerah lebih menjaga kawasan daerahnya dan lebih tegas agar tidak terjadi pelanggaran serupa

1. Penyiapan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan tata ruang secara konsisten, teratur dan akurat.

2. Peningkatan SDM teknis pelaksana pengawasan tata ruang dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan.

3. Perumusan target jumlah pengawasan pada tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

4. Pelibatan aparat sebagai pelaksana pada setiap kelurahan/desa dan kecamatan.

kaltim.atrbpn.go.id | kaltim@atrbpn.go.id | Kanwil BPN Kaltim | @kanwilbpnkaltim

**KEMENTERIAN ATR/BPN**  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Kalimantan Timur

**TERIMA KASIH**

kaltim.atrbpn.go.id | kaltim@atrbpn.go.id | Kanwil BPN Kaltim | @kanwilbpnkaltim

## B. Pertanyaan Anggota Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI

Drs Cornelis, MH

1. Untuk pemilih di IKN saya kira sebaiknya tidak perlu terlalu aktif, karena itu akan membebani kerja dan tidak anggarannya
2. KPU dan Bawaslu perlu selalu koordinasi
3. Terkait tanah Dayak tolong dibuatkanlah PSTL sehingga kepemilikannya jelas
4. Untuk IKN kalau itu HPL tidak perlu diganti rugi, kan itu pada dasarnya tanah negara, jadi tidak perlu mengeluarkan

Drs. Defriadi

1. Bagaimana dengan NIK yang tidak terkoneksi sehingga tidak bisa untuk PTSL

2. Saya kecewa gub ngga datang
3. Tanah Dayak dibantu setitifikasi sehingga mereka beraktivitas ekonomi, karena transmigrasi dapat, kenapa wilayah Dayak di dalam hutan masuk HTI sehingga tidak keluar sertifikasi.

H. Wahyu Sanjaya, SE

1. Reforma agraris, kontribusi gubernur, bagaimana agar program reforma agraria tersebut dapat berjalan lancar.
2. Apa yang sudah dilakukan bupati/walokota apa kontribusinya dalam reforma agraria

Dr. Mardani, MEng

1. PTSL apakah realistiknya anggarannya?
2. Tunjangan kinerja di BPN rendah dibandingkan dengan kementerian lain perlu mendapatkan perhatian agar take home pay nya meningkat
3. Untuk PTSL tanah Dayak tolong dibantu PTSL agar segera dapat sertipikat.

H. Khairul Mukhtar, SE, MM

1. Saya kecewa dengan paparan mitra dan Yang paling serius cuman BPN

Rezka Oktoberia

1. E ktp untuk anak 17 tahun sehingga ikut memilih, termsuk purnawiran tni polri bagaiman Kerjasama pemprov dan KPU untuk mempersiapkan pemilih pemula ini
2. Bagaimana dengan netralitas ASN dalam pemilu
3. Terkait dengan akhir masa jabatan KPU kaltim, saya minta tetap focus jangan terganggu oleh masa jabatan, masalah itu akan diselesaikan dengan KPU RI.
4. Inventarisasi konflik lahan terdampak IKN, jangan sampai masyarakat terugikan

### **C. Catatan**

1. Komisi II DPR RI meminta BPN Kanwil Kalimantan Timur untuk memberikan laporan berkala perkembangan lahan-lahan IKN. Sehingga Komisi II DPR RI mendapat mendapatkan informasi yang valid terkait perkembangan IKN.
2. Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk memantau dan membuat regulasi terkait akhir masa jabatan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum jika terjadi pemberhentian komisioner tersebut terjadi saat pemilu sedang berlangsung. Agar persoalan-persoalan dalam tahapan pemilu dapat berlangsung secara aman dan terkendali.
3. Komisi II DPR RI meminta KPU Kalimantan Timur melakukan optimalisasi perencanaan distribusi logistic pemilu dengan melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri.

4. Komisi II DPR RI meminta KPU Kalimantan Timur untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemilih tambahan di lokasi pembangunan IKN agar tidak hilang hak pilihnya dalam pemilu 2024.

#### D. FOTO KEGIATAN



#### III. Penutup

Seluruh data, informasi, ataupun masukan hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti oleh para Anggota Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.

**KOMISI II DPR RI  
KETUA TIM KUNRES**

**Yanuar Prihatin, MSi.**